

Otoritas Perbankan dan Pembayaran

Untuk definisi dari kata-kata yang *dicetak tebal*, lihat daftar istilah di halaman 5.

Setiap negara perlu untuk mengatur sumber daya keuangan publik dan membuat keputusan mengenai **kebijakan moneter**, seperti mengelola **nilai tukar**, menetapkan rata-rata **suku bunga**, dan keputusan lain mengenai **mata uang** sebuah negara. Sebagai tambahan, semua pemerintah membutuhkan jasa keuangan; untuk mengumpulkan pajak, pembayaran gaji dan membuat pembayaran bahan-bahan yang dibeli atas nama publik. Para pemerintah juga perlu untuk mengatur lembaga-lembaga keuangan, seperti bank-bank dan para **agen penukaran mata uang asing**, yang melakukan bisnis di negara mereka. Di Timor Lorosa'e, jasa-jasa tersebut disediakan oleh Otoritas Perbankan dan Pembayaran.

Sebelumnya Otoritas Perbankan dan Pembayaran dikenal sebagai Kantor Pembayaran Pusat. Kantor ini didirikan pada awal tahun 2000 oleh Dana Moneter Internasional (IMF) setelah IMF memenuhi undangan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan untuk berpartisipasi dalam Misi Penilaian Bersama pada Bulan September 1999, dan untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap rancangan dan pembangunan lembaga-lembaga keuangan Timor Lorosa'e. IMF mengidentifikasi dan mempekerjakan orang-orang untuk mendirikan dan mengoperasikan Kantor Pembayaran Pusat dan Otoritas Fiskal Pusat yang kelak menjadi Otoritas Perbankan dan Pembayaran dan Kementerian Perencanaan dan Keuangan. IMF juga menulis regulasi-regulasi UNTAET yang mendirikan dan mendefinisikan kewajiban-kewajiban dari Otoritas Perbankan dan Pembayaran. Regulasi mengenai Otoritas Perbankan dan Pembayaran di Timor Lorosa'e sama dengan regulasi yang ditulis oleh IMF untuk Otoritas

Perbankan dan Pembayaran di Kosovo, yang bukan merupakan negara independen.

Otoritas Perbankan dan Pembayaran meliputi sebuah Departemen Perbankan dan Pembayaran, Departemen Perijinan dan Pengawasan, dan Divisi **Statistik** dan **Ekonomi**. Divisi Akuntansi dan Anggaran menulis laporan empat bulanan dan tahunan bagi dewan pengurus pemerintahan dan **auditor** dari luar juga mengelola anggaran Otoritas Perbankan dan Pembayaran. Otoritas Perbankan dan Pembayaran juga mempunyai sebuah Departemen Administrasi dan Divisi Teknologi Informasi.

Jasa Keuangan kepada Pemerintah

Otoritas Perbankan dan Pembayaran menyediakan jasa perbankan dan keuangan kepada pemerintah. Semua sumber keuangan dikelola oleh Otoritas Perbankan dan Pembayaran, yang menampilkan semua fungsi bank kecuali meminjamkan uang kepada perseorangan atau bisnis kecuali bagi bank-bank komersial. Otoritas Perbankan dan Pembayaran hanya dapat menginvestasikan uang di bank nasional pemerintah atau bank sentral. Regulasi mengenai Otoritas Perbankan dan Pembayaran menyatakan bahwa secara hukum pemerintah tidak diijinkan menyimpan uang publik di bank lain selain di Otoritas Perbankan dan Pembayaran. Hal ini untuk memastikan uang publik dikelola lembaga publik bukan lembaga swasta seperti sebuah bank komersial.

(Lanjutan ke halaman 2)



Daftar isi . . .

Daftar Istilah Perbankan	5
Pernyataan Sikap Forum Masyarakat Sipil Se-Asia Pasifik	6
Kampanye Menentang Kekerasan	7
Intercambio Kuba-Timor Lorosa'e	8
Uang dari Hasil Minyak Mensyaratkan Menejemen yang Baik	10
Intercambio Timor Lorosa'e-Nigeria	11
Dr. Andrew McNaughtan, 1954-2003	12
Editorial: Keadilan setelah Berakhirnya UNMISSET	16

Dana Moneter Internasional (IMF)

Timor Lorosa'e menjadi anggota IMF yang ke 184 pada Bulan Juli 2002. Masing-masing negara anggota IMF membayar biaya sumbangan tahunan yang disebut kuota, berdasarkan kekayaannya. Ukuran kuota suatu negara menentukan tingkat keterlibatannya di dalam proses mengambil keputusan di IMF.

IMF, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, bukan lembaga yang demokratis. Negara-negara kaya dengan kuota yang tinggi mendominasi proses mengambil keputusan di IMF. Lima anggota terkaya di IMF – Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, dan Perancis – bersama-sama mengontrol hampir 40% total pengambilan suara. Berlawanan dengan posisi tersebut, Timor Lorosa'e hanya 0.02% dari total pengambilan suara dan benar-benar tidak dapat berkata apa-apa dalam proses pengambilan suara.

Tidak mengejutkan, IMF meneruskan agenda dari kebanyakan para anggotanya yang paling kuat, yang mempromosikan liberalisasi ekonomi dan globalisasi. Hal ini berarti tidak ada regulasi terhadap penanaman modal asing; sedikit pemerintah yang mengontrol mengalirnya modal di dunia internasional; dan membatasi regulasi pemerintah mengenai upah dan harga. Negara-negara didorong untuk mengkaitkan perekonomian mereka dengan pasar dunia, daripada mengontrol untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga negara mereka sendiri. Untuk informasi lebih jelas, baca *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 2 No. 3.

Sebagai bagian dari jasa bank kepada pemerintah, Otoritas Perbankan dan Pembayaran melakukan pembayaran bagi pemerintah, seperti gaji kepada pegawai pemerintah atau pembayaran kepada bisnis asing atau domestic yang menyediakan barang-barang atau jasa kepada pemerintah. Pada saat pemerintah perlu untuk melakukan pembayaran, Ia akan menginstruksikan Otoritas Perbankan dan Pembayaran untuk melakukan pembayaran atas nama pemerintah.

Sekarang ini, masyarakat dapat membayar pajak dan ongkos kepada pemerintah melalui *Banco Nacional Ultramarino (BNU)*. Hal ini karena BNU beroperasi di Timor Lorosa'e sebelum Otoritas Perbankan dan Pembayaran berdiri, dan disetujui untuk menerima pembayaran pajak dalam sebuah perjanjian informal dengan UNTAET. Regulasi UNTAET yang mendirikan Otoritas Perbankan dan Pembayaran juga menyatakan bahwa Otoritas Perbankan dan Pembayaran harus menjadi satu-satunya penerima dana publik, yang membuat BNU sebagai penerima ilegal pembayaran pajak. Oleh karena itu, Otoritas Perbankan dan Pembayaran membuka sebuah rekening yang terpisah dengan BNU untuk setiap pajak pemerintah. Contoh, sebuah rekening yang terpisah dibuka untuk pajak pendapatan, pajak pembelian, dan lain-lain. Pada masing-masing hari, Otoritas Perbankan dan Pembayaran memindahkan dana-dana keluar dari BNU dan memasukannya ke Otoritas Perbankan dan Pembayaran.. Otoritas Perbankan dan Pembayaran mempunyai rencana yang sama dengan *Instituicao de Micro-financas de Timor Leste (IMTL)*, dan di masa depan, masyarakat dapat juga membayar pajak di Bank Mandiri dan *Bank Australia New Zealand (ANZ)*.

Sebagai tambahan terhadap rekening pemerintah dan bank-bank, Otoritas Perbankan dan Pembayaran menyimpan **rekening-rekening** bagi lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Ketika Timor Lorosa'e bergabung dengan masing-masing lembaga keuangan, Otoritas Perbankan dan Pembayaran membuka sebuah rekening bagi mereka. Rekening-rekening 'tidak aktif' ini tidak digunakan secara harian seperti rekening di bank-bank. Rekening tersebut digunakan untuk membayar biaya sumbangan tahunan. Timor Lorosa'e harus membayar karena anggota dari setiap lembaga keuangan internasional.

Pengawasan Bank-Bank

Masing-masing bank di Timor Lorosa'e – ANZ, BNU, dan Bank Mandiri – secara hukum disyaratkan untuk membuka rekening dua dengan Otoritas Perbankan dan Pembayaran. Satu rekening adalah rekening umum untuk pembayaran antara bank-bank. Tidak ada jumlah minimum untuk rekening ini dan **saldo** ditentukan oleh bank. Bank juga mempunyai rekening **jaminan** yang digunakan untuk menjamin transaksi antar bank. Saldo minimum adalah \$50,000 dan Otoritas Perbankan dan Pembayaran membayar bunga pada rekening ini, berjumlah total \$260,000 pada akhir tahun keuangan (2002-2003)

Semua transaksi keuangan antara bank-bank yang beroperasi di Timor Lorosa'e diproses melalui Otoritas Perbankan dan Pembayaran. Karena kebanyakan transaksi di Timor Lorosa'e dalam bentuk tunai, tidak terdapat banyak pemindahan semacam ini.

Otoritas Perbankan dan Pembayaran juga bertanggung jawab untuk mengawasi semua bank dan para agen penukar mata uang asing yang beroperasi di Timor Lorosa'e. Otoritas Perbankan dan Pembayaran juga mengawasi IMTL tetapi tidak mengawasi proyek kredit usaha kecil (*microfinance*) yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah internasional maupun nasional. Semua bank dan para agen penukar mata

Perbankan Pendapatan dari Minyak

Karena minyak dan gas dari Bayu-Undan dan sumur minyak yang lain di wilayah Timor Lorosa'e telah terjual, Pemerintah telah menerima prosentase pendapatan kotor, yang disebut *First Tranche Petroleum atau FTP*. Banyak ahli, termasuk Pemerintah Norwegia, Bank Dunia, dan IMF mendukung uang ini untuk tidak digunakan sebagai biaya operasional, tetapi ditaruh pada sebuah dana cadangan dimana pendapatan tersebut dapat membantu program pemerintah setelah semua minyak dan gas telah habis diolah.

Pemerintah Timor Lorosa'e telah menyetujui ide ini, dan menyimpan uang FTP (sebesar \$10.5 juta hingga hari ini) ke dalam rekening tersendiri di Otoritas Perbankan dan Pembayaran. Akan tetapi, tidak ada perlindungan hukum yang dikembangkan untuk memastikan bahwa uang cadangan tersebut aman, dan Pemerintah telah mengusulkan untuk menggunakannya guna membantu sedikit kekurangan dana (*financial gap*) selama tiga tahun ke depan. Selama tahun 2004, IMF dan Pemerintah akan merancang sebuah struktur dana cadangan untuk uang yang diperoleh dari minyak, dan masyarakat sipil harus terlibat untuk melindungi hak generasi mendatang.

uang asing perlu memperoleh sebuah ijin dari Otoritas Perbankan dan Pembayaran untuk beroperasi di Timor Lorosa'e. Dewan Pengurus Otoritas Perbankan dan Pembayaran memutuskan apakah Otoritas Perbankan dan Pembayaran akan atau tidak akan mengeluarkan sebuah ijin. Semua ijin lembaga keuangan didaftarkan kepada Otoritas Perbankan dan Pembayaran.

Semua lembaga-lembaga keuangan harus mengajukan pemeriksaan secara teratur oleh Otoritas Perbankan dan Pembayaran, termasuk pemeriksaan di tempat dan di luar lokasi, yang mana merupakan laporan bulanan dari lembaga kepada Otoritas Perbankan dan Pembayaran. Otoritas Perbankan dan Pembayaran menganalisa semua laporan dan menghimpun statistik moneter yang mana Otoritas Perbankan dan Pembayaran mempublikasikannya di surat kabar dan buletin empat bulanan mereka sendiri.

Setiap empat bulan, masing-masing bank harus mengajukan laporan gabungan mengenai keseluruhan status keuangannya karena semua bank-bank yang beroperasi di Timor Lorosa'e berasal dari negara-negara lain. Pengawasan di tempat adalah sebuah **audit**

tahunan yang dilaksanakan di tempat bank tersebut oleh pengawas Otoritas Perbankan dan Pembayaran yang memeriksa semua rekening dan pernyataan keuangan.

Otoritas Perbankan dan Pembayaran dapat mengecek situasi keuangan sebuah bank tetapi tidak dapat ikut campur dalam operasional bekerjanya bank. Contoh, Otoritas Perbankan dan Pembayaran tidak dapat membatasi \$2 per bulan beberapa bank menarik biaya bagi penabung.

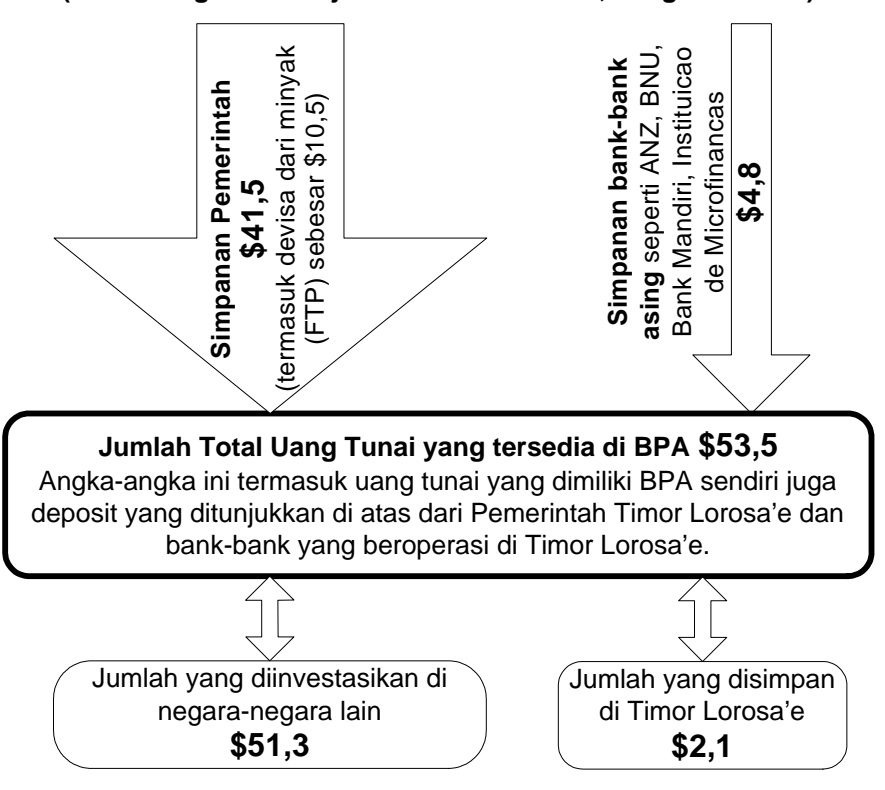
Struktur Menejemen

Otoritas Perbankan dan Pembayaran mempunyai sebuah tim menejemen yang terdiri dari Menejer Umum dari Portugal, Wakil Menejer Umum untuk pembayaran dari Selandia Baru, Wakil Menejer Umum untuk Pengawasan dari Timor Lorosa'e dan Kepala Akuntan dari Uganda.

IMF merekrut dan membayar gaji secara bersama-sama dengan UNMISSET bagi Menejer Umum dan Wakil Menejer Umum untuk Pembayaran. Para menejer ini tidak harus berurusan dengan semua persyaratan pelaporan dan evaluasi, dan sepertinya tidak diakhiri pada saat mandate UNMISSET berakhir pada Bulan Juni 2004 karena posisi ini bagian dari struktur menejemen Otoritas Perbankan dan Pembayaran. UNMISSET membayar untuk Kepala Akuntan dan Ahli Ekonomi Senior.

Perundang-undangan mengatur Otoritas Perbankan dan Pembayaran untuk memberikan kewenangan yang banyak kepada Menejer Umum di dalam Otoritas Perbankan dan Pembayaran dan secara konsekuen dengan pengaruh yang banyak terhadap persoalan-persoalan moneter masyarakat Timor Lorosa'e. Menurut Menejer Umum sekarang ini, para pemimpin Timor Lorosa'e meminta Bank Portugal untuk merekrut seseorang, dan kemudian Bank Portugal meminta kepada IMF untuk mengidentifikasi dan merekrut posisi ini. Bank Portugal juga meminta IMF untuk membayar setengah gajinya. Oleh karena itu, Menejer Umum dievaluasi oleh

Kemana Otoritas Perbankan dan Pembayaran menyimpan (semua angka dalam jutaan Dolar Amerika, uang Juni 2003)



Bank Portugal, IMF, dan Pemerintah Timor Lorosa'e. Menejer Umum mengevaluasi staf yang berkaitan dengan pengelolaan bank mengenai pekerjaan yang mereka lakukan di Otoritas Perbankan dan Pembayaran. Jika seorang penasihat internasional menampilkan kerja yang tidak bagus, Menejer Umum (bukan IMF) yang memutuskan apakah dia akan terus bekerja di Otoritas Perbankan dan Pembayaran.

Otoritas Perbankan dan Pembayaran mempunyai sebuah dewan pengurus pemerintahan yang seharusnya terdiri dari tiga anggota eksekutif, Menejer Umum Otoritas Perbankan dan Pembayaran, Wakil Menejer untuk Pembayaran, Wakil Menejer untuk Pengawasan, dan empat anggota non eksekutif dari masyarakat sipil. Dewan pengurus pemerintahan bertanggung jawab untuk memutuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya. Dewan ini juga badan pengawas kesalahan Otoritas Perbankan dan Pembayaran.

Sekarang ini, dewan pengurus pemerintahan hanya terdiri dari tiga anggota eksekutif (dua staf internasional dan satu orang Timor Lorosa'e), meskipun Regulasi mengenai Otoritas Perbankan dan Pembayaran sekarang ini, disebarluaskan pada Bulan Nopember 2001, menyatakan paling tidak empat anggota dewan pengurus pemerintahan haruslah orang-orang Timor Lorosa'e. Sekarang ini, tidak ada anggota dari masyarakat sipil yang diangkat. Secara konsekuen, tidak ada badan pengawas kesalahan yang efektif.

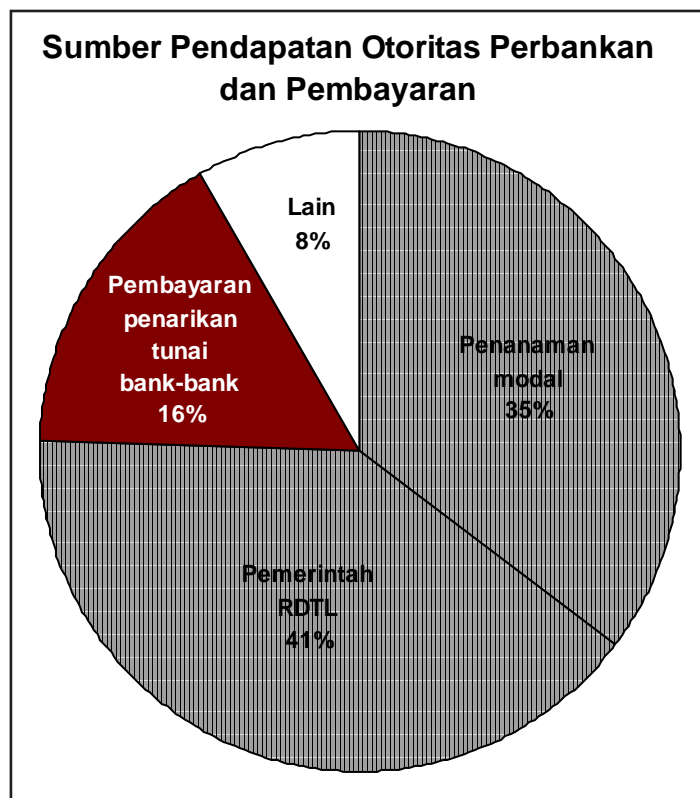
Siapa yang Membayar untuk Otoritas Perbankan dan Pembayaran?

Otoritas Perbankan dan Pembayaran mempunyai pendapatan sendiri. Otoritas Perbankan dan Pembayaran memperoleh uang dengan menarik biaya untuk jasa perbankan yang disediakan kepada pemerintah dan agen-agen yang mempunyai rekening di Otoritas Perbankan dan Pembayaran. Sebagai contoh, bank-bank dikenakan biaya 0,6% untuk setiap penarikan uang tunai dari Otoritas

Perbankan dan Pembayaran. Pendapatan Otoritas Perbankan dan Pembayaran yang paling tinggi pada akhir tahun (41%) berasal dari biaya yang dibayar oleh pemerintah, berjumlah hingga \$562,401.

Otoritas Perbankan dan Pembayaran juga memperoleh bunga pada dana-dana yang diinvestasikan di luar negeri. Kebanyakan modal yang disimpan di Otoritas Perbankan dan Pembayaran diinvestasikan di luar negeri. Otoritas Perbankan dan Pembayaran mengelola uang dengan prinsip sebuah tingkat resiko yang bisa diterima. Hal ini berarti membuat seimbang antara resiko-resiko dari uang yang diinvestasikan dengan perolehan yang dapat dibuat. Beberapa penanaman modal bisa menyediakan pengembalian yang lebih tinggi tetapi lebih beresiko tinggi. Dana publik masyarakat Timor Lorosa'e ditabung di bank sentral di negara-negara lain untuk memperoleh bunga. Otoritas Perbankan dan Pembayaran tidak mengatakan kepada *La'o Hamutuk* disimpan di bank sentral yang mana. Otoritas Perbankan dan Pembayaran diijinkan untuk menginvestasikan uang masyarakat Timor Lorosa'e di negara-negara yang melanggar hukum internasional atau menganiaya hak asasi manusia.

Otoritas Perbankan dan Pembayaran memperoleh \$1,371,710 dari semua kegiatannya selama tahun keuangan 2002-03. Pengeluaran Otoritas Perbankan dan Pembayaran termasuk gaji staf, administrasi, bunga pada dana yang disimpan di dalam rekening dan biaya yang timbul dari mendatangkan Dolar Amerika baru. Pengeluaran total berjumlah hingga \$910,935 selama periode yang sama. Pendapatan Otoritas Perbankan dan Pembayaran melebihi pengeluarannya sebesar \$460,775. Kelebihan ini ditaruh pada rekening cadangan yang digunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul di masa depan. Jika pendapatan bersih Otoritas Perbankan dan Pembayaran pada tahun keuangan yang di atas melebihi lima persen dari jumlah total di rekening bank yang dipegang oleh Otoritas Perbankan dan Pembayaran, kelebihan tersebut dapat dipindahkan ke dalam anggaran nasional pemerintah.



Kebijakan Moneter

Karena Timor Lorosa'e menggunakan mata uang US Dolar, Otoritas Perbankan dan Pembayaran tidak dapat mempengaruhi rata-rata nilai tukar. Otoritas Perbankan dan Pembayaran belum membuat batasan pada nilai bunga. Bunga pinjaman saat ini sangatlah tinggi (17% per tahun) karena kurangnya regulasi mengenai asuransi dan registrasi tanah menambah resiko pinjaman dan mengurangi jaminan tertentu. Ketika asuransi dan harta kepemilikan dapat digunakan untuk menjamin pinjaman, bank-bank akan menarik sedikit bunga bagi pinjaman-pinjaman karena keduanya akan sedikit beresiko. Jika Otoritas Perbankan dan Pembayaran membuat batas rata-rata nilai bunga di bawah tingkatan yang ada sekarang ini, bank-bank tidak akan meminjamkan uang apapun karena mereka akan mempertimbangkan ini beresiko juga.

Otoritas Perbankan dan Pembayaran juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa terdapat cukup uang kertas di Timor Lorosa'e untuk menutup semua transaksi dalam bentuk tunai, tetapi Otoritas Perbankan dan Pembayaran tidak dapat mencetak mata uang. Oleh karena itu, Otoritas Perbankan dan Pembayaran mengelola pengiriman Dolar dari luar negeri dan pembagiannya. Banyak dolar yang keluar dari Timor Lorosa'e untuk pembayaran **impor** dari Australia dan Indonesia. Jumlah **impor** di Timor Lorosa'e lebih banyak daripada **ekspornya**. Dolar-dolar yang lain ditarik dari peredaran karena masa berlaku dan kualitasnya yang tidak bagus dan dikirim balik ke Amerika Serikat untuk dihancurkan. Otoritas Perbankan dan Pembayaran harus mendatangkan dolar baru dari Amerika Serikat dengan biaya yang dapat dipertimbangkan. Tahun ini, 25% (\$230,000) dari pengeluaran-pengeluaran Otoritas Perbankan dan Pembayaran adalah biaya transport untuk mendatangkan dan mengekspor uang kertas Dolar.

Kesimpulan

IMF mendirikan Otoritas Perbankan dan Pembayaran dan masih terlibat melalui misi tetapnya. IMF melanjutkan menyediakan bantuan teknis jika diperlukan. Staf di bidang manajemen bersama-sama dengan IMF bertanggung jawab untuk mengambil keputusan jika dan pada saat bantuan teknis diperlukan. Hal ini telah mengarahkan kebutuhan yang mendesak dari penyediaan sebuah sistem pembuatan pembayaran bagi pemerintah dan sebuah cara perijinan dan pengaturan bank-bank.

Otoritas Perbankan dan Pembayaran akan mandiri, bank sentral di Timor Lorosa'e pada saat Hukum Perbankan disetujui oleh Parlemen. Karena Timor Lorosa'e menggunakan Dolar, Otoritas Perbankan dan Pembayaran merupakan alat yang lebih independen untuk menyediakan jasa pembayaran dan mengatur bank-bank daripada sebuah alat untuk menyusun kebijakan moneter, dimana hal ini dibatasi untuk memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah didasarkan pada statistik yang dihipunkannya.

Bagi bank-bank sentral di negara-negara berkembang dan sedang berkembang dengan nilai tukar mereka sendiri, menyusun kebijakan moneter telah terbukti sangat problematik. Para spekulasi mata uang yang memperdagangkan mata uang telah menyebabkan persoalan ekonomi secara besar-besaran. Hal ini merupakan satu hasil dari deregulasi ekonomi dunia yang dipromosikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat kuat di dunia. ❖

Daftar Istilah Perbankan

Agen Penukar Mata Uang Asing. Seseorang yang membeli dan menjual mata uang yang berbeda.

Aset. Harta kekayaan atau uang yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga seperti bank atau lembaga usaha.

Audit. Sebuah pemeriksaan rekening oleh seseorang atau perusahaan yang independen. Sebuah audit dapat juga membuktikan efisiensi sebuah lembaga penyimpanan rekening.

Bank. Sebuah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada para individu, kelompok, dan lembaga usaha. Jasa ini dapat berupa memasukkan uang di dalam rekening, memindahkan uang ke luar negeri, membuat pembayaran atas nama pemegang rekening, menyediakan jasa penukaran mata uang, dan meminjamkan uang. Bank juga memperoleh uang dengan menarik biaya bagi jasa mereka, penanaman uang dan menarik bunga atas pinjaman mereka.

Ekspor. Sumber daya alam seperti minyak, produk pertanian seperti kopi dan barang-barang dan jasa lain yang mana sebuah negara menghasilkan dan menjualnya ke negara lain. Misal, Timor Lorosa'e adalah sebuah negara penghasil dan penjual kopi ke negara lain.

Ilmu Ekonomi. Sebuah studi mengenai bagaimana barang-barang (makanan dan pakaian) dan jasa (pendidikan, perawatan kesehatan) dihasilkan, dibagikan, dan digunakan.

Impor. Barang-barang dan jasa yang dihasilkan di negara-negara lain yang dibawa ke suatu negara dan dijual. Misal, beberapa barang yang didatangkan ke Timor Lorosa'e termasuk bahan bakar solar dan rokok Gudang Garam.

Inflasi. Sebuah pertambahan harga suatu barang dan jasa. Hal ini dapat terjadi ketika persediaan uang bertambah atau ketika tuntutan atas jumlah yang terbatas atas barang bertambah. Di Timor Lorosa'e, inflasi terjadi ketika staf internasional dalam jumlah yang besar dibayar tinggi oleh UNTAET.

Jaminan. Uang atau harta kekayaan yang dipakai sebagai jaminan. Biasanya, masyarakat perlu untuk memberikan sebuah jaminan sebelum bank meminjamkan mereka uang. Misal, jika seseorang ingin meminjamkan uang untuk memulai sebuah bisnis, mereka dapat menggunakan rumahnya sebagai jaminan. Jika bisnis tersebut gagal, bank akan mengambil dan menjual rumah mereka, mengembalikan uang apapun sebesar jumlah yang dipinjamkan kepada orang tersebut.

Kebijakan Moneter. Sebuah ketetapan tindakan atau keputusan mengenai mata uang nasional. Keputusan-

keputusan ini dapat mengenai nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang nasional, atau menetapkan batas nilai suku bunga yang dapat dikenai biaya.

Kreditor. Seseorang atau lembaga yang dipinjamkan uang oleh orang lain.

Mata Uang. Uang tunai kertas dan koin (contoh, Dolar dan *Centavos* Timor) yang dapat diganti dengan barang-barang atau jasa.

Modal. Harta kekayaan atau kekayaan.

Nilai Suku Bunga. Prosentase jumlah di dalam sebuah rekening atau pinjaman yang dibayarkan atau dikenai biaya dalam periode waktu yang diberikan. Otoritas Perbankan dan Pembayaran dapat menetapkan nilai rata-rata bunga, meskipun sekarang ini penetapan suku bunga terjadi di Timor Lorosa'e. Nilai suku bunga mempunyai dampak yang penting. Jika bunga pada pinjaman lebih tinggi, masyarakat tidak akan meminjam. Jika nilai suku bunga lebih rendah, orang akan lebih banyak meminjam uang. Dengan menetapkan nilai suku bunga, sebuah bank dapat mempengaruhi orang-orang untuk membelanjakan uang lebih banyak dari yang mereka punya.

Nilai Tukar. Nilai dari satu mata uang berkaitan dengan mata uang yang lain. Nilai dari mata uang yang berbeda berubah secara tetap. Nilai tukar digunakan untuk menentukan berapa mata uang yang dapat anda beli dengan mata uang yang lain – contoh, satu dolar bisa membeli Rp8.500.

Penurunan Nilai Tukar. Mengurangi sebuah nilai mata uang tertentu terhadap nilai mata uang lain.

Rekening. Sebuah kesepakatan antara seorang penabung dan sebuah bank untuk menyimpan uang.

Saldo. Jumlah uang yang disimpan di dalam sebuah rekening.

Statistik. Informasi mengenai angka-angka. Otoritas Perbankan dan Pembayaran menaruh perhatian dengan menghimpun informasi mengenai harga barang-barang dan jasa di Timor Lorosa'e. Otoritas Perbankan dan Pembayaran menggunakan informasi berdasarkan statistik untuk membuat keputusan mengenai kebijakan moneter.

Suku Bunga. Sebuah ongkos atau pembayaran untuk menggunakan uang orang lain. Sebagai contoh, sebuah bank membayar bunga bagi uang yang disimpan di dalam sebuah rekening karena bank dapat menggunakan uang untuk penanaman modal. Jika sebuah bank meminjamkan uang, bank akan menarik biaya bunga rata-rata dengan lebih tinggi kepada seseorang, kelompok atau lembaga usaha yang menggunakan uang.

Pernyataan Sikap Forum Masyarakat Sipil Se-Asia Pasifik Mengenai Tujuan Pembangunan di Masa Millenium dan Pemberantasan Kelaparan dan Kemiskinan Yang Tinggi

Pada awal Oktober, Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik PBB menyelenggarakan pertemuan awal Komite mengenai Pengentasan Kemiskinan. Komite meminta Focus on Global South untuk mengorganisir usulan masyarakat sipil dan mengundang Tomas Freitas dari La'o Hamutuk serta para aktivis dari negara-negara di Asia Pasifik ke Bangkok sebelum pertemuan Komite. Dari pertemuan itu, para peserta menulis pernyataan di bawah ini. Pertemuan Komite Ekonomi dan Sosial ini bagian dari Kampanye PBB di seluruh dunia yang fokus pada "Tujuan Pembangunan di Masa Millenium" yang disahkan oleh Majelis Umum pada tahun 2000 dan disebarluaskan oleh UNDP (Baca Buletin La'o Hamutuk Vol 4, No. 2).

Kami, perwakilan dari organisasi non pemerintah dan organisasi rakyat, berkumpul di Bangkok dari 14 negara di wilayah Asia Pasifik, untuk Forum Masyarakat Sipil se-Asia Pasifik, 6-8 Oktober 2003 untuk memberikan masukan pada pertemuan pelantikan Komite Pengurangan Kemiskinan.

Kami mempunyai perhatian dan rekomendasi berikut ini:

- § Tujuan Pembangunan di Masa Millenium mengesampingkan isu hak asasi manusia yang lebih penting dan kritis. Norma-norma dan standar-standar tertentu berhubungan secara khusus dalam membicarakan persoalan kemiskinan, seperti non diskriminasi yang efektif, pengakuan kelompok-kelompok rentan, hak atas standar hidup yang memadai, hak untuk bebas dari kelaparan, hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, dan hak atas pembangunan. Komite sebaiknya menegaskan dan melaksanakan hak-hak berdasarkan pendekatan-pendekatan terhadap pemberantasan kemiskinan. Organisasi-organisasi masyarakat sipil telah menyetujui pendekatan ini dalam perjuangan mereka melawan kemiskinan.
- § Tujuan Pembangunan di Masa Millenium sendiri juga memformulasikan persoalan kemiskinan dalam konteks visi, ruang lingkup, dan arah secara sempit. Ini bukanlah sasaran menurut angka-angka yang secara sederhana akan dicapai dalam sebuah tanggal tertentu dan oleh perbaikan-perbaikan teknis. Penyelesaian yang bertahan lama dan berkelanjutan terhadap kemiskinan akan mensyaratkan keterlibatan aktif kaum miskin dan masyarakat sipil, sebuah pengertian yang lebih melibatkan banyak hal terhadap akar penyebab kemiskinan dan konsekuensi yang bermacam-macam dan multidimensial dan kebijakan-kebijakan yang tepat.
- § Dalam hal ini, pelaksanaan terhadap pengukuran kemiskinan dalam konteks pendapatan dan tingkat konsumsi adalah tidak sesuai. Kami mendesak Komite untuk mempertimbangkan dimensi politik, sosial, budaya, dan hak asasi manusia, yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti kelas, jender, warna kulit, geografi dan kesukuan. Definisi yang lebih luas ini perlu di dalam menyusun kebijakan dan program yang lebih sensitif dan tanggap terhadap kemiskinan. Kami telah menawarkan sebuah

konseptualisasi awal mengenai definisi yang lebih luas ini dalam "kertas kerja" kita.

- § Agar supaya partisipasi menjadi lebih berarti dan sungguh-sungguh, pertanggungjawaban dan peran-peran dalam perjuangan melawan kemiskinan seharusnya tidak didefinisikan bagi masyarakat sipil dan kaum miskin. Proses formulasi dan pelaksanaan kebijakan pengurangan kemiskinan sekarang ini tidak menggasak akar kemiskinan. Ini dikarenakan pada kenyataannya bahwa kaum miskin sendiri tidak dilibatkan dalam keseluruhan proses. Kami merekomendasikan garis-garis pedoman prinsip yang disetujui oleh UNESCAP dan setiap pemerintah individual di wilayah Asia-Pasifik.
- ◆ Pada tingkat makro, keputusan kebijakan dan proyek pengurangan kemiskinan harus berkonsultasi dengan masyarakat sipil dan organisasi kaum miskin sebelum pelaksanaan. Konsultasi dan seleksi dari proses partisipasi harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- ◆ Pada tingkat mikro, sebelum disetujui, proyek pengurangan kemiskinan harus mencari pengesahan terbanyak dari kaum miskin yang wilayahnya mendapatkan dampak.
- ◆ Indikator-indikator dari proses-proses ini harus direfleksikan di dalam penilaian-penilaian tahunan.
- § Tujuan Pembangunan di Masa Millenium tidak memberikan sebuah peninjauan ulang analisa yang dalam terhadap perubahan kebijakan dan institusi. Oleh karena itu, untuk menghubungkan Tujuan Pembangunan di Masa Millenium dengan sebuah perangkat resep-resep utama yang akan menjadi pendekatan yang salah, tidak masalah kebijakan yang diresepkan, secara tepat karena tidak ada satu pun kebijakan "yang benar" bagi semua masyarakat dan kondisi. Dalam hal ini, semua kebijakan satu-ukuran-cocok untuk semua seperti cara Bank Dunia dan IMF memberikan inisiatif *Kertas Strategi Pengentasan Kemiskinan (PRSP)* yang dipraktekkan haruslah ditolak. Kami menuntut bahwa Komite dan UNESCAP melibatkan dan mengakui kaum miskin sebagai peserta yang berhak penuh secara aktif di dalam pembuatan formulasi strategi dan kebijakan pemberantasan kemiskinan apapun.
- § Usaha-usaha pembangunan yang sukses mensyaratkan kebijakan-kebijakan yang sesuai pada tingkat domestik, regional, dan internasional. Akan tetapi, akhir-akhir ini struktur ekonomi internasional tidak adil dan berlawanan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan di Masa Millenium itu sendiri. Komite sebaiknya mengarahkan percabangan globalisasi dan untuk memfasilitasi formulasi perubahan-perubahan yang perlu.
- § Perhatian dan sumber daya keuangan dialihkan jauh dari prioritas yang mengarahkan kemiskinan dan kelaparan secara langsung dan malah dialokasikan ke pelayanan hutang dan pembelanjaan kebutuhan militer. Terdapat sebuah kebutuhan yang mendesak untuk mengorientasikan

kembali pengeluaran pemerintah. Komite sebaiknya mengidentifikasi sumber daya secara jelas yang dibutuhkan bagi pemerintah-pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program pemberantasan kemiskinan. Lebih jauh, apa yang diberikan oleh aspek-aspek multidimensi kemiskinan, Komite juga harus mempertimbangkan pelaksanaan anggaran-kemiskinan dengan teliti dalam semua aspek pengeluaran pemerintah. Akhirnya, sumber daya yang cukup sebaiknya juga diidentifikasi dan disalurkan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat sipil dan kaum miskin.

Kami menantang Komite untuk menyetujui sebuah pemahaman mengenai kemiskinan dan kelaparan dengan lebih bersungguh-sungguh dan mengintensifkan kerjanya terhadap pemberantasan kemiskinan dengan segera.

Ditandatangani oleh:

La' o Hamutuk, Timor Lorosa'e

Asian Forum for Human Rights and Development (Forum Asia), Wilayah Regional

ActionAid, Bangladesh

LOKOJ, Bangladesh

The Women's Agenda for Change Project-Oxfam Hong Kong, Kamboja

ECREA, Fiji

Center for Organisation Research and Education (CORE), India

Solidaritas Perempuan, Indonesia

Institute of Global Justice, Indonesia

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Indonesia

Third World Network, Malaysia

Rural Reconstruction Nepal/South Asia Poverty

Eradication Network, Nepal

Partners With Melanesians Inc., Papua New Guinea

Tebtebba Foundation, Filipina

HomeNet Filipina

Movement for National Land and Agricultural Reform (MONLAR), Sri Langka

Shan Women's Action Network (SWAN)

Asia-Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), Wilayah Regional

CARE International, Vietnam

Assembly of the Poor, Thailand

Focus on the Global South, Wilayah Regional ❖

Enambelas Hari Kampanye Menentang Kekerasan



Selama enam belas hari (25 Nopember sampai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, 10 Desember 2003) *Movimento Nasional Kontra Violencia (MNKV)* melakukan kampanye menentang kekerasan di empat distrik, yaitu: Oecusse, Aileu, Maliana dan Lautem. Kampanye tersebut bertemakan: "Cinta, Damai, Kesetaraan dan Keadilan untuk menghentikan Kekerasan di Timor Lorosae".

Tim kerja MNKV sebanyak 20 orang (masing-masing distrik lima orang pelatih) melakukan pelatihan dan

pendidikan kepada tiga kelompok sasaran, yaitu kelompok anak, kelompok remaja dan kelompok dewasa tentang Hak Asasi Manusia secara umum, termasuk Hak Anak, Jender dan Kekerasan Rumah Tangga.

Kampanye diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan yang berbasis pada jender di empat distrik, dan untuk mengkoordinasikan para anggota MNKV di tingkat nasional dan distrik dengan baik, khususnya di empat distrik tersebut. ❖

Partisipantes Intercambio fila mai husi Cuba

Iha fulan Outubro 2003 iha aktivista nain sia (husi organizasaun *La'o Hamutuk*, Fokupers, Perkumpulan Hak, Fundasaun Haburas, Feco-Uatocarabau, Naroman-Bukoli, Asosiasaun Mane Kontra Violencia no Instituto Sa'he ba Libertasaun) servisu hamutuk ho Centro Martin Luther King iha Cuba halao Intercambio atu aprende liu tan kona ba sistema alternativo nebe desenvolve iha neba hanesan sistema politika, edukasaun, saude no ekonomia inklui agrikultura, no mos atu desenvolve relasaun solidaridade povo ba povo entre ema Timor Lorosa'e no ema Cuba.

Depois de manan revolusaun iha tinan 1959 hasoru ditadura Batista, Cuba ho lideransa Fidel Castro halo transformasaun sosial bo'ot hodi harii sistema foun no troka sistema tuan nebe hanehan povo. Governo halo nasionalizasaun ba rai no propriedade privado inklui mos igreja. Rai nain bele iha maximum 64 hectares, liu ne'e governo foti. Agora iha Cuba sektor publiko mak domina sektor privado no governo mak kaer hodi servi povo. Atu bele hatene uitoan kona ba Cuba, tuir mai ami sei hakerek kona ba edukasaun agrikultura, no saude nebe ami hare durante loron ruanulu iha Cuba.

Edukasaun

Cuba nudar rai ida nebe laiha ona analfabetismo. Cuba konsege elimina analfabeto iha tinan ida nia laran. Kampanya alfabetizasaun halao iha tinan 1961 nebe involve 260,000 voluntarios hodi halakon analfabeto. Iha

tinan 1961 ema nebe analfabeto iha 23.6% iha tinan ida nia laran tun to'o 3.6% analfabeto no agora 0.2% analfabeto. Voluntarios nebe involve iha kampanya alfabetizasaun mai husi agrikultores, trabalhadores, estudantes no militares.

Em geral, edukasaun komesa husi eskola infantil too iha Universidade Gratuita -- katak la selu. Eskola obrigatorio ba ema hotu-hotu to'o remata sekundaria. Bainhira estudante ida lakohi atu kontinua ba Universidade nia tenke buka fali kursu ruma para bele tuir no bele hetan esperencia/skill espesifiku liu atu nune'e bele hetan servisu hodi bele sustenta ba nia moris rasik.

Kurikulum nebe sira uza ne'e sentralistiko katak saida mak estudante sira iha cidade sira uza hodi estuda hanesan mos sira nebe hela iha fatin isolado (maski kurikulum ne'e desenvolve husi cidade maibe qualquer populasaun Cuba hatene oinsa vida passa iha cidade no iha fatin isolado tamba edukasaun nebe mak sira hanorin ba alunos sira bazeia ba valor ema nian no solidaridade no la sees husi povo nia moris lor-loron). Edukasaun ba ema hotu, bainhira iha estudante ida iha foho ruma, entao governo haruka professores no facilidade hanesan livru, komputador, video, televisaun no

facilidade eletrisidade hodi uza tenaga surya. Buat nebe hanorin eskola mak buat sira nebe povo enfrenta loron-loron. Matenek nebe sira aprende iha relasaun ho sira nia moris loron-loron. Por exemplo, agrikultura nebe hanorin iha universidade ne'e kona ba problema agrikultura nebe povo enfrenta loron-loron, nunka hanorin buat nebe sei la serve ba povo nia moris. Estudante nebe akaba tiha ona universidade sira sei ba moris hamutuk ho povo durante tinan rua. Depois de tinan rua sira bele buka servisu ba fatin nebe sira hakarak. Sistema edukasaun iha Cuba halo ema desenvolve nia an bazeia ba solidariedade no humanismo. Susar tebes ita atu hetan ema nebe uza sira nia matenek atu servi ba sira nia an deit.

Cuba mos iha universidade populcar. Universidade ida ne'e ba ema hirak nebe hakarak atu desenvolve tan sira nia kapasidade intelektual no la hare ba tinan ho nivel edukasaun nebe estudante iha. Universidade ida halo ema organizador

komunidade ida iha suco ruma bele kontinua ba universidade. Ema katuas no ferik iha possibilidade atu tama universidade ne'e se sira hakarak, konforme materias nebe sira hakarak atu aprende.

Agrikultura

Reforma agraria sai fator importante iha agrikultura. Tamba rai luan barak nebe uluk ema rico nian, governo reforma no fo ba povo atu halo produsaun. Tamba ne'e agora iha Cuba laiha sektor privada nebe dominante. Iha

rai nebe povo iha sira halao produsaun liu husi koperativa. Iha koperativa rua: Coperativa Produsaun Agrikola (CPA) no Coperativa Credito Servico (CCS). Coperativa involve iha produsaun no distribusaun produktu agricultura. Governo fo rai ba povo nebe laiha rai hodi povo bele halo produsaun atu sustenta sira nia moris mos ba desenvolvimento ekonomia Cuba nian. Governo la fo rai naran-naran deit maibe iha konkordansia entre povo ho governo kona ba produsaun. Iha CPA rai no ekipamentu povo hotu nian. Sira uza hamutuk. Iha CCS povo nebe iha rai no equipamentus sira tau hamutuk entre sira hodi halao produsaun hamutuk.

Funsaun governo ba desenvolvimento agrikultura mak hanesan tuir mai:

1. Sosa produsaun koperativa no distribui ba povo ho mos eksporta ba rai seluk. Produsaun nebe koperativa sira iha, governo sosa 80% produsaun koperativa nian. 20% produsan nebe iha sira bele uza hodi sustenta sira nia moris ho mos fa'an livre tuir sira nia hakarak.
2. Fo kredito ba koperativa: governo fo kredito bazeia ba nesesidade koperativa ninian.



Visitantes Timor Lorosa'e kuda nu'u oan hamutuk ho organisador-sira husi projectu conservasaun hahan iha Lima en la Lisa.

3. Fo asistensia teknika: asistensia teknika nebe governo fo mak hanesan iha matenek nain nebe governo prepara hodi tulun agrikultor sira hanesan oinsa bele hetan produsaun nebe diak, halo konta no seluk-seluk tan

4. Governo kontrola folin: laiha merkado livre iha Cuba. Sasan nia folin laos desidi husi ema nebe fa'an maibe husi goveno. Governo kontrola folin hodi deside folin nebe labele tun liu husi buat nebe governo deside mos labele aas liu tuir standar governo nian.



Participantes visita klinik maternidade iha Havana. Hamriik, husi liman karik to'o liman lo'os: Alida de la Vega (Centro M.L. King), Jose Monteiro, Alberto (Centro M.L. King), Doutor, Maria Jose Guterres, Mericio Juvinal, Inês Martins, Pedro Hortensio, Mario Belo. Tuur: Gabriel da Silva, Nuno Rodrigues, Jose Luis Oliveira.

Governo desde revolusaun to'o agora sei fahe nafatin hahan loron-loron ba nia povo. Hahan sira ne'e mai husi povo no fila fali ba povo. No mos husi produsaun koperativa ne'e hahan fo ba hospital no eskola.

Iha tinan 1961 Cuba hetan blokeio husi Estados Unidos liu-liu ba iha parte ekonomia husi importasaun no exportasaun tamba Cuba sai Nasaun Sosialista. Cuba hetan blokeio husi Estados Unidos nebe haterus povo, ema barak nebe sai husi sira nia suco ba cidade. Maibe laos katak sira husik ona sira nia agrikultura. Ba povo sira nebe iha cidade governo desenvolve mos agrikultura urbana. Povo nebe muda ba cidade sira forma koperativa hodi utiliza rai mamuk iha cidade atu bele sustenta sira nia moris no fo aihan ba ema sira nebe nesesa. Povo ida-idak nebe iha rai mamuk iha uma oin, mos sira utiliza atu bele fo aihan ba sira.

Saude

Em geral, iha Cuba ema la selu atu hetan tratamento saude. Husi ain kanek to'o operasaun kakutak ema la selu tratamento nebe ema hetan. Iha Cuba iha tinan 2003 mortalidade labarik sira nebe foin moris ki'ik liu no bele hare tuir tabela iha kraik.

Nasaun	Mortalidade infantil por 1000
Cuba	7
Estados Unidos	7
Indonesia	33
Timor Lorosa'e	85

Husi: UNDP Human Development Report 2003

Iha rai mundo tomak, Cuba deit mak famoso nudar nasaun nebe fo prioridade boot liu ba saude, doutores Cuba voluntariamente sira mos fo asistensia ba nasaun seluk. Agora dadaun iha 41,500 doutores Cuba nebe namkari iha nasaun 85 tamba povo Cuba tomak fo valor ba humanismo no solidar-

idade.

Cuba nia sistema saude nia entedimento iha tipo tolu, premier/preventivo ka doutor da familia, sekundario ka doutor espesialista no terciario/hospital nasional. Doutor da familia ida fo asistensia ba habitantes 100-150. Doutor da familia ne mak fo asistensia populasaun sira iha baze. Ho doutor da familia agora iha Cuba konsege fo asistensia ba 98% populasaun Cuba. Ema hotu iha asesu ba doutor da familia. Iha doutor da familia mos iha klinika nebe atende ema durante 24 horas. Iha dader doutor da familia fo konsulta ema no lokraik

nia halo visita ba ema moras, ema isin rua, ema nebe foin hahu moras no ema nebe moras nebe presiza fo asistensia. Iha semana ida dala ida iha doutores espesialista sira sempre hala'o visita ba iha klinika doutor da familia atu bele hare no hatene presiza doutor da espesialista nia ajuda. Doutor da familia ne'e nia objectivu atu prevenia moras sira liu-liu hahu husi baze atu nune'e wainhira iha ona prevensaun entao moras makas sei lahetan. Ema nebe mak halo konsulta iha klinika wainhira la passa duni entao presiza duni ajuda husi espesialista. Doutor iha suco wainhira iha (doutor da familia) premier/preventiva labele ona entaun espesialista halo analize hodi halo tratamento maibe se labele hetan nafatin resultado entao sira (doutores) tenke halo estudo ida tan ba iha Hospital Nasional. Terciario/hospital nasional ne'e mak sei iha doutores hot-hotu no equipamentos oi-oin atu bele atende wainhira iha sekundario la atende no sira koko atu maneija oinsa bele hetan solusaun no atu atende pasiente ida nia nesidades.

Cuba iha sistema saude nebe diak ho teknologia avansado tamba ne'e agora estudantes barak husi nasaun seluk inklui mos Timor Lorosa'e no Estados Unidos ba aprende saude iha Cuba.

Kontinuasaun husi Tim Intercambio Cuba ne'e:

1. Workshop dala uluk hala'o tiha ona iha Lospalos no workshop dala rua sei hala'o iha fulan Feveireiru nia laran objectivo workshop hafahe informasaun ba maluk movimento no organizasaun kona ba informasaun no esperencia nebe mak tim intercambio hetan iha Cuba.
2. Sei hakerek memoria atu nune'e ba maluk sira mak hakarak hatene liu tan informasaun kona ba Cuba bele lei iha memoria.
3. Fahe informasaun liu husi encontro kiik no halo diskusaun. ❖

Uang dari Hasil Minyak Mensyaratkan Manajemen yang Baik

Oleh Joseph E. Stiglitz*

Kenyataan yang menyedihkan tetapi memang benar-benar terjadi bahwa—negara-negara yang kaya sumber daya alam tidak berkembang lebih cepat atau lebih baik dibandingkan mereka yang mempunyai sumber daya alam lebih sedikit. Pengamatan ini akan terlihat bertentangan dengan hukum dasar ekonomi, bahwa sumber daya alam seharusnya lebih memberikan keuntungan dan kesempatan ekonomi. Para ahli ekonomi dan pengamat sosial lainnya telah bekerja keras untuk menjelaskan keganjilan ini dan bagaimana negara-negara dapat memaksimalkan keuntungan dari sumber daya alam mereka yang berlimpah.

Tetapi, kegagalan ini berulang kali dan berlangsung terus-menerus. Nigeria, yang kaya minyak, menghambur-hamburkan seperempat milyar dolar devisa dari minyak dan terbelit hutang secara serius. Dua-pertiga dari jumlah penduduk Venezuela masih hidup dalam kemiskinan. Perang sipil, berkembang dalam berbagai tingkatan yang berbeda dikarenakan perebutan kewenangan untuk mengontrol minyak, gas, dan bahan-bahan mineral, telah menghancurkan sekelompok negara-negara kaya sumber daya alam.

Bagian dari ketidakstabilan ini dijelaskan secara sederhana dengan Ilmu Ekonomi. Kekayaan sumber daya alam dapat menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang. Ketidakstabilan nilai tukar mata uang ini dapat menyebabkan nilai tukar yang melemahkan sektor-sektor ekonomi yang tidak berbasis pada sumber-sumber daya alam dengan membuat kesulitan bagi para pengusaha industri untuk mengeksport atau untuk berkompetisi dengan barang-barang impor. Sementara itu, sektor sumber daya alam ekonomi memberikan devisa yang penting, tetapi tidak menciptakan lapangan pekerjaan melalui perekonomian. Hasil dari pengangguran dapat meningkatkan ketidakstabilan politik dan sosial.

Tetapi problem yang paling penting di kebanyakan negara-negara yang kaya sumber daya alam adalah persoalan politik. Kontrol terhadap persoalan kekayaan sumber daya alam memberikan para pemimpin sedikit dorongan untuk berbagi kekuasaan, dan memberikan perangkat-perangkat untuk membeli pengakuan kekuasaan (legitimasi), daripada memperolehnya melalui pemilihan umum bagi para pemimpin. Para pemimpin menggunakan banyak modal untuk membeli dukungan politik melalui penciptaan pekerjaan dengan kontrak yang seringkali dianugerahkan kepada “orang-orang dalam” yang mempunyai hubungan baik. Karena pencarian kontrak dan negara mensubsidi permodalan secara langsung terhadap ketidakmampuan proyek-proyek yang tidak berjalan dari penarikan dana swasta, banyak proyek-proyek besar gagal untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap pengembangan sumber daya alam.

Keinginan pemerintah untuk mengontrol kekayaan sumber daya alam secara berlanjut seringkali tidak didukung oleh pembangunan demokrasi dan konflik kekerasan dan perlawanan oleh mereka yang tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan sumber daya alam dan siapapun yang merasa di luar sistem yang terpusat. Sistem yang terpusat adalah sistem yang tidak demokratis.

Untuk mencegah hasil yang demikian, para pemimpin politik dan warga negara perlu memperhatikan sumber daya alam negara sebagai anugerah milik bangsa. Sumber daya

alam ini bukan milik pemerintah atau generasi tertentu, tetapi milik semua warga negara dan generasi-generasi selanjutnya. Pemerintahan dan generasi sekarang merupakan satu-satunya pengawas. Menggunakan sumber-sumber daya alam tersebut bagi keuntungan seseorang, meninggalkan generasi masa depan dalam kemiskinan, merupakan pencurian terhadap harta nenek moyang. Para pemimpin di dalam dan luar pemerintahan berbagi rasa pertanggungjawaban pengelolaan di negara-negara yang kaya sumber daya alam.

Keterbukaan informasi mengenai devisa yang diterima dan standar perhitungan pajak merupakan kunci untuk meningkatkan manajemen sumber daya alam dan kekayaan. Kerangka-kerangka kerja perhitungan nasional yang tidak menghitung menipisnya sumber daya alam secara tepat merupakan kesalahan; mereka mendesak pemerintah-pemerintah untuk berpikir bahwa perekonomian menjadi semakin sejahtera, ketika perekonomiannya mungkin menjadi lebih miskin. Hal ini merupakan pemikiran terhadap kesejahteraan yang mengarah pada keputusan yang buruk.

Bahkan yang lebih penting adalah informasi mengenai apakah yang diterima oleh Pemerintah untuk minyak atau sumber daya alam lainnya, bagaimana membandingkannya dengan negara-negara lain yang menerima, dan bagaimana Pemerintah menggunakan dana yang diterima dari penjualan sumber daya alam. Pemerintah seharusnya mengakui bahwa di beberapa negara yang telah berkembang, dengan perusahaan minyak sebagai pendapatan utama bahkan mencoba untuk meminimalkan pembayaran royalti mereka dengan melaporkan harga efektif minyak lebih rendah dan melaporkan biaya lebih tinggi. Hal ini hanya melalui penelitian yang serius di mana beberapa penggelapan diketemukan, contoh, di Negara Alaska, dan hal ini didapatkan hanya melalui hukuman yang lebih tinggi di mana akhirnya perusahaan-perusahaan minyak setuju untuk membayar lebih dari satu milyar dolar karena mereka menghindari pembayaran kepada negara.

Para perusahaan mempunyai tunjangan yang besar untuk memperbesar keuntungan dan ketidakjelasan yang mengelilingi kontrak-kontrak dan pembayaran uang minyak yang dapat mengarah pada pelanggaran. Akan tetapi sedikit perusahaan minyak, banyak dicatat adalah *British Petroleum*, yang membuat contoh yang berlawanan, yang timbul dari keinginan pihak *British Petroleum* sendiri, mereka mempublikasikan sebenarnya apa yang mereka bayar. Seperti mengizinkan warga negara di negara-negara yang kaya sumber daya alam untuk mendapatkan informasi mengenai berapa banyak pemerintah menerima pemasukan dari sumber daya alam. Hal ini disayangkan karena komitmen terhadap kerja sama kewarganegaraan yang baik belum dijalankan oleh kebanyakan perusahaan minyak lain.

Rencana organisasi seperti stabilisasi dana-dana adalah penting untuk mengatur kesejahteraan yang diperoleh dari sumber daya alam dan meyakinkan bahwa uang yang digunakan untuk menggantikan sokongan sumber daya alam yang telah dikosongkan. Stabilisasi dana-dana di beberapa negara telah membantu menyediakan dana-dana publik bagi musim hujan pada saat mereka dibutuhkan. Hal ini sangat penting karena perencanaan internasional seperti IMF, yang didirikan di akhir Perang Dunia II untuk membantu keuangan-kebijakan pajak yang beredar, telah gagal untuk

menjalankan fungsinya bagi mereka IMF dibentuk. Hasil telah didesakkan bahwa kebanyakan negara-negara sedang berkembang didesak untuk terlibat dalam kebijakan pajak yang beredar, biaya yang cukup terhadap perekonomian dan masyarakat. Sekarang ini, negara-negara mengakui bahwa berhutang mempunyai resiko yang sangat tinggi, dan mereka harus mengandalkan sumber daya alam mereka sendiri, khususnya untuk tujuan stabilisasi.

Tidak ada persoalan yang lebih penting selain memastikan kesejahteraan dan stabilitas dalam jangka panjang bagi

negara-negara kaya sumber daya alam dengan mengembangkan cara penggunaan sumber-sumber daya ini dan kesejahteraan yang mereka gunakan dengan baik. ❖

**Joseph E. Stiglitz, pemenang Nobel dalam bidang Ekonomi, mantan Kepala Ahli Ekonomi untuk Bank Dunia hingga tahun 2000. Sekarang dia mengajar di Universitas Columbia, di Amerika Serikat. Artikel ini dicetak ulang dengan ijin dari Buku Caspian Oil Windfalls: Who Will Benefit? (Caspian Revenue Watch, 2003).*

Intercambio Timor Lorosa'e-Nigeria mengenai Pembangunan Perminyakan

Tujuh aktifis Timor Lorosa'e dari enam LSM lokal yang berbeda, mengunjungi Nigeria mulai 11-28 Januari 2004. Kunjungan tersebut untuk mempelajari industri minyak dan gas. La'o Hamutuk telah mempersiapkan kelompok ini, yang termasuk (Kiri-Kanan) Jesuina Soares (*La'o Hamutuk*), Carlos A. B. Florindo (ETADEP), Julino Ximenes da Silva (Perkumpulan HAK), João da Silva Sarmiento (*La'o Hamutuk*) and Liliana E. A. C. Hei (*Grupo Feto Enclave Oe-cusse*) berdiri; Aurelio Freitas Ribeiro (KSI, and Justino da Silva (Forum LSM) di depan.



Foto dari Timor Sun

Oilwatch Afrika dan *Environmental Rights Action* di Nigeria menjadi tuan rumah

yang membantu terselenggaranya kunjungan ini. Kelompok intercambio ini berharap dapat belajar dari pengalaman Nigeria mengenai dampak negatif dan positif selama empat puluh tahun pembangunan perminyakan. Mereka juga akan bertemu dengan masyarakat di Delta Niger, pejabat pemerintah, dan LSM lokal untuk melihat bagaimana minyak dan gas telah berdampak pada lingkungan, politik, standar hidup, dan kualitas hidup, dan untuk melihat pelajaran yang baik dan buruk dimana Timor Lorosa'e dapat belajar dari pengalaman Nigeria. Sekembalinya ke Timor Lorosa'e, mereka akan mengembangkan dan berbagi pemahaman kepada masyarakat sipil dan pejabat yang berwenang. ❖

Dengarkan Program Radio La'o Hamutuk

Wawancara dan komentar mengenai isu-isu yang kami investigasi dan isu-isu lainnya dalam Bahasa Tetum dan Indonesia:

Setiap Hari Sabtu pukul 11.00 pagi
di Radio Timor Leste dan Radio Timor Kmanek.

Dr. Andrew McNaughtan, 1954-2003

Para pendukung keadilan dan hak asasi manusia di seluruh dunia kehilangan kawan yang memiliki komitmen dan sangat bernilai ketika Ahli Fisika berkewarganegaraan Australia, Andrew McNaughtan, tanpa diharapkan, meninggal dunia di rumahnya di Sydney, Bulan Desember tahun lalu. Khususnya bagi Timor Lorosa'e, kehilangan dia, keduanya, baik atas kerja-kerja yang telah dia lakukan dengan efektif untuk mengedepankan kemerdekaan Timor Lorosa'e, dan untuk kerja efektif yang dia lakukan untuk masa depan untuk mendukung hak asasi manusia dan kemandirian secara ekonomi bagi negara baru ini.

Andrew mendapatkan motivasi dari perasaannya yang tajam terhadap keadilan, dan diikuti oleh naluri dengan analisa dan keahlian yang luar biasa. Dia menghabiskan waktu setahun di Nikaragua, kerja-kerja pengobatan, dan kemudian berlanjut membantu orang-orang Nigeria, Indonesia, Aceh, Papua, dan bahkan Amerika yang berjuang demi keadilan. Tetapi, dalam beberapa minggu sejak dia meninggal, banyak kawan yang berbagi kenangan. Masing-masing dari kita telah belajar banyak mengenai Andrew, dan semuanya telah terpesona dengan kerjanya yang luas, dan banyak hasil yang diperoleh. Sesungguhnya, sulit untuk memikirkan siapapun orang asing yang memberikan sumbangan lebih kepada kemerdekaan Timor Lorosa'e dari apa yang dilakukan Andrew.

Meskipun Andrew orang Australia, berhak sakit hati oleh dukungan Pemerintahnya terhadap pendudukan Indonesia, dia memahami pentingnya kampanye dan strategi internasional.

Selama 1990, dia telah berulang kali mengunjungi Timor Lorosa'e, melakukan wawancara dan film mengenai situasi orang-orang dan membuat video-nya tersedia bagi para wartawan, juru kampanye, dan pejabat di seluruh dunia. Pada waktu orang-orang Timor Lorosa'e ditangkapi dan sulit untuk meneghubungki kelompok-kelompok hak asasi manusia di seluruh dunia, Andrew dengan pintar menggunakan "hak-hak istimewa sebagai orang asing" untuk melakukan apa yang mereka tidak dapat lakukan.

Andrew mengawali kehidupannya sebagai orang dewasa sebagai seorang pengelas dan pembalap motor. Setelah dia mendapatkan kecelakaan motor, dia memutuskan untuk belajar di sekolah kedokteran. Tetapi kesabaran dan rasa cintanya yang nyata adalah untuk

melawan ketidakadilan, dan dia menyadari bahwa dia dapat bekerja lebih efektif bagi Timor Lorosa'e sebagai seorang juru kampanye daripada memberikan perawatan kesehatan. Dia mulai mendukung Timor Lorosa'e pada tahun 1992, dan menjadi staf penyebarluasan informasi bagi *East Timor International Support Center* yang berkedudukan di Darwin, dan Koordinator *Australia-East Timor Association* di Sydney.

Suara, advokasi yang strategis dan gigih dari Andrew mengenai kasus Timor Lorosa'e dengan media dan politisi Australia adalah penting untuk meletakkan kerja-kerja dasar bagi perubahan yang terlambat di Canberra

tahun 1999 untuk mendukung Timor Lorosa'e. Seringkali dia menggunakan foto para korban Timor Lorosa'e. Video dan terbitan-terbitannya digunakan oleh banyak aktivis dan jurnalis dan disebarluaskan secara luas, memaksa banyak orang untuk mengakui kejahatan-kejahatan yang telah terjadi di Timor Lorosa'e, setelah selama ini mereka secara sengaja membutakan mata atas peristiwa-peristiwa tersebut.

Andrew mengetahui kepentingan yang strategis terhadap solidaritas di seluruh dunia, dan dia membantu para pengorganisir kampanye

dengan hebat sekali di Amerika Serikat dan di tempat-tempat lain yang memiliki akses sedikit terhadap informasi daripada audio visual di Australia. Andrew juga berpartisipasi dalam Konferensi APCET (Koalisi Asia Pasifik untuk Timor Lorosa'e) dan telpon genggamnya memainkan peran yang penting untuk berhubungan dengan media ketika para peserta Konferensi APCET II ditangkap oleh Kepolisian Malaysia pada tahun 1999.

Andrew menyelenggarakan pameran lebih dari 100 foto untuk membantu orang-orang memahami sejarah Timor Lorosa'e dan enam set foto telah dipamerkan di seluruh dunia. Ketika mereka mengadakan pameran di Gedung Parlemen, Canberra, pada tahun 1997, Pemerintah Australia mengganti judulnya dari "Kawanmu Tidak Akan Melupakanmu" menjadi "Sejarah Timor Lorosa'e pada Perang Dunia II", dan foto-foto yang menunjukkan peristiwa-peristiwa setelah 1975 disensor, dan hanya dapat dipamerkan di sebuah gereja setempat.

Pada Bulan Oktober 1998, Indonesia mengklaim akan menarik tentaranya dari Timor Lorosa'e. Tetapi, orang-orang mengetahui bahwa apa yang terjadi adalah sebaliknya. Dari seorang anggota perlawanan klandestin



Foto oleh Vaughan Williams

di dalam Kantor Staf ABRI, Andrew memperoleh dokumen militer Indonesia, berisikan lebih dari 100 halaman. Dokumen ini membuktikan bahwa pengerahan tentara sebenarnya lebih banyak dari yang dinyatakan oleh Pemerintah RI di Jakarta, dan semakin bertambah banyak. Secara diam-diam, Andrew memperoleh ahli analisa untuk dokumen ini, dan bersama-sama berkoordinasi mengeluarkan informasi secara serentak ke London, Washington, Jakarta dan Canberra untuk menyebarluaskan kebohongan Jakarta pada waktu yang genting, meletakkan fokus media internasional pada pendudukan militer paska Soeharto.

Andrew selalu sangat dermawan dengan uang pribadinya, dan memberikan lebih dari 20 ribuan dolar kepada Falintil dan kerja-kerja Xanana Gusmão. Sebelum dan selama referendum 1999, sekali lagi Andrew kembali ke Timor Lorosa'e. Dia memberikan uang dan bantuan lain untuk mengamankan orang-orang yang menjadi sasaran TNI/milisi demi keselamatan mereka, dan mengumpulkan informasi mengenai para milisi, serta menginformasikannya kepada PBB, jurnalis, pejabat, dan aktivis di seluruh dunia. Beberapa hari menjelang referendum, dia dan dua orang kawan Australia ditangkap oleh Polisi Indonesia di *Zumalai* setelah mereka diserang oleh para milisi. Meskipun mereka dideportasi beberapa hari kemudian, Andrew mengetahui hasil pengambilan suara di dalam tahanan. Dia mengamati petugas Brimob yang menahannya benar-benar terkejut bahwa 79% orang memilih untuk merdeka dengan mengesampingkan kampanye teror oleh Pemerintah Indonesia—bukti nyata bagaimana penjajah Indonesia memahami orang-orang Timor Lorosa'e.

Andrew kembali ke Timor Lorosa'e pada akhir September 1999, dan kembali lagi beberapa kali. Dia membantu InterFET untuk memahami konteks sejarah dan politik, juga informasi kekinian negara yang baru saja mereka datangi untuk "mengamankannya." Dia bekerja dengan *Timor Aid*, membantu kawan-kawan Timor Lorosa'e yang memiliki persoalan-persoalan pribadi, dan mendidik dirinya sendiri dan banyak orang lain pada tantangan-tantangan baru yang dihadapi Timor Lorosa'e—khususnya mengejar keadilan terhadap orang-orang Indonesia, para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Lorosa'e, dan mencegah Australia mencuri mayoritas sumber daya minyak dan gas milik Timor Lorosa'e. Di antara proyek-proyek lain, dia bekerja sama dengan jurnalis HT Lee memproduksi video *Don't Rob Their Future: Give Them a Fair Go*, yang menjadi bagian dari CD-ROM *OilWeb* yang diterbitkan oleh *La'o Hamutuk*.

Selama 2003, beberapa orang asing yang memberikan

uang sumbangan kepada Timor Lorosa'e, meninggal dunia lebih awal, termasuk Dr Andrew McNaughtan, Padre Stefani Renato (Pendukung Timor Lorosa'e untuk jangka waktu panjang, berkebangsaan Italia/Jepang, sejak 2000 menjadi pendeta di wilayah Atsabe, meninggal dunia pada Bulan Oktober karena kecelakaan mobil), Sergio Vieira de Mello, dan empat tentara PKF Korea terbawa arus di sebuah sungai di Oecussi. Masing-masing kematian ini tragis, tetapi kami percaya bahwa mereka yang memilih untuk mengabdikan hidup kepada rakyat Timor Lorosa'e dan sebagai bangsa yang merdeka – Andrew dan *Padre Stefani* – berhak mendapatkan pengakuan khusus.



Sejak 1999, banyak orang asing yang datang ke Timor Lorosa'e untuk mengedepankan karir, mendapatkan uang, mematuhi perintah, atau berbagi dalam kemerdekaan Timor Lorosa'e, dan bantuan mereka diterima. Tetapi antara 1975 hingga 1999, tidak ada manfaat bersifat materi dalam mendukung Timor Lorosa'e. Orang-orang seperti Andrew McNaughtan, yang menghentikan karir mereka, dan menggunakan banyak uang pribadinya untuk ikut serta dalam perjuangan Timor Lorosa'e melawan ketidakadilan, adalah harta benda yang tidak tergantikan. Meskipun ribuan rakyat Timor Lorosa'e lebih menderita dan menanggung resiko yang lebih tinggi dari siapapun aktivis solidaritas yang pernah mereka dapat lakukan, perjuangan bagi negara mereka adalah, di akal kita, memaksa mereka untuk berjuang. Andrew melakukan kesemuanya ini dengan sukarela, dari rasa hati yang dalam untuk berbagi rasa kemanusiaan.

Kawan-kawan Andrew adalah orang-orang Timor Lorosa'e dan lainnya berjuang demi keadilan. Dia tidak disukai para pemerintah atau diplomat – kebenaran yang dia bicarakan seringkali membuat tidak nyaman bagi mereka yang berada dalam kekuasaan. Tetapi kemerdekaan Timor Lorosa'e berhutang pada kebenaran tersebut dan kepada orang-orang yang berbicara tentang kebenaran itu, lebih dari berhutang pada para lembaga dan pemerintah yang mengetahui Timor Lorosa'e setelah perjuangan dimenangkan.

Kami berharap bahwa Pemerintah baru Timor Lorosa'e mengingat dan menghargai kawan-kawannya dari tahun-tahun yang panjang dan sulit, dan ini akan memprioritaskan hubungan manusia ini di atas para lembaga yang suka sekali memuji-muji. Tetapi sekalipun tidak, orang-orang Timor Lorosa'e – banyak yang beruntung mengenal Dr Andrew McNaughtan secara pribadi dan lebih banyak lagi yang berhutang atas kebebasan mereka sebagian terhadap kerja dia – akan menghargainya dan melanjutkan komitmennya terhadap keadilan. ❖

Editorial: Keadilan setelah Berakhirnya Misi UNMISSET (Kelanjutan dari halaman 16)

oleh Pemerintah Indonesia. Panel Khusus Kejahatan Berat hanya mengadili 30 kasus (yang mendakwa 46 orang), dengan delapan proses pengadilan yang sekarang dalam proses.

Ketika Unit Kejahatan Berat mengeluarkan dakwaan untuk para komandan tingkat tinggi Indonesia hampir satu tahun yang lalu, PBB dan Pemerintah Timor Lorosa'e mengambil jarak terhadap proses ini; surat perintah penangkapan belum dikeluarkan atau disampaikan kepada Interpol untuk dakwaan ini dan dakwaan-dakwaan lainnya.

Selama dua tahun masyarakat internasional tidak melakukan tindakan yang efektif, dengan menggunakan pengadilan hak asasi manusia *ad hoc* yang bohong-bohongan sebagai alasan. Beberapa hari yang lalu, kebohongan terakhir terjadi dengan pengadilan banding Indonesia yang menegaskan pembebasan Jenderal Timbul Silaen, sehingga memungkinkannya melakukan kejahatan yang sama terhadap rakyat Papua Barat seperti yang dilakukannya di Timor Lorosa'e tahun 1999.

Catatan dukungan untuk keadilan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, termasuk tiga misi PBB di Timor-Lorosa'e selama lima tahun ini, amat sangat mengecewakan. Meskipun demikian, Aliansi Nasional Timor-Lorosa'e tetap percaya bahwa ada orang-orang dan lembaga-lembaga di dalam sistem PBB yang setuju dengan seruan kami untuk sebuah pertanggungjawaban. Oleh karena itu kami mengusulkan tiga pilihan, dengan urutan, untuk dipertimbangkan oleh PBB ketika Anda menetapkan sifat keterlibatan PBB setelah UNMISSET berakhir.

1. Pengadilan pidana internasional untuk Timor-Lorosa'e, yang didukung dengan kesungguhan politik untuk mendesak kerja sama Indonesia, tetap merupakan mekanisme yang paling mungkin untuk memberikan keadilan. Dari tahun 1974 sampai hari ini, Indonesia telah berkali-kali melakukan atau terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, dan tidak mau atau tidak mampu untuk membuat para pelakunya bertanggungjawab. Tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah-pemerintah dunia – paling utama dari pemerintah-pemerintah yang punya kekuatan global atau regional atau yang mempunyai hubungan ekonomi atau keamanan yang erat dengan Indonesia – kejahatan ini akan berlanjut dengan kekebalan hukum. Para pemimpin politik dan militer Indonesia beruntung menjalankan kejahatan mereka di Timor-Lorosa'e sebelum pembentukan Pengadilan Pidana Internasional, tetapi tidak ada hambatan hukum untuk membawa mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi universal yang didefinisikan dalam Statuta Roma.

2. Sebelum suatu pengadilan internasional didirikan, memperpanjang dan memperkuat Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus Kejahatan Berat gabungan UNMISSET-RDTL bisa memberikan keadilan yang

lebih daripada yang dimungkinkan selama ini. Kami mendesak PBB, khususnya para anggota Dewan Keamanan, untuk memperkuat mandat keadilan bagi misi PBB setelah UNMISSET, dan mendukung mandat tersebut dengan sumber daya dan komitmen politik untuk mendesak Indonesia agar mau bekerjasama. Komitmen ini sampai sekarang masih rendah, tetapi ketidakpatuhan Indonesia terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan perilaku yang beradab, seruan-seruan untuk keadilan yang disampaikan oleh para korban kejahatan mereka di Timor Lorosa'e dan Indonesia, seharusnya membangunkan kembali pemerintah-pemerintah di dunia tentang kebutuhan ini. Dalam kasus ini, Panel Khusus juga harus diperluas, karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengadili orang-orang yang telah didakwa sekalipun.

3. Jika PBB dan pemerintah-pemerintah dunia terus tidak mau memberikan dukungan yang berarti untuk keadilan bagi kejahatan terhadap umat manusia dan Timor-Lorosa'e, suatu kelanjutan Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus Kejahatan Berat yang tanpa perubahan itu tidak diperlukan. Dalam kenyataan, Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus Kejahatan Berat UNMISSET/UNTAET telah menjalankan tiga peran:

- a) Penyelidikan dan pengumpulan bukti mengenai kejahatan berat yang dilakukan di sini, yang kadang-kadang mengarah pada dakwaan dan pernyataan pers, kadang-kadang surat perintah penangkapan, dan jarang diadili di pengadilan.
- b) Menghadapkan orang Timor Lorosa'e pelaku-pelaku tingkat rendah ke pengadilan dan menjatuhkan hukuman.
- c) Memberikan alasan kepada Pemerintah Timor Lorosa'e dan masyarakat internasional untuk menghindari tindakan yang berarti untuk keadilan.

Kami yakin bahwa dengan tidak adanya komitmen politik yang kuat, Panel Khusus harus dihentikan ketika mereka menyelesaikan semua pengadilan yang telah dimulai sebelum misi UNMISSET berakhir di bulan Mei 2004. Tugas (b) yang hanya inilah yang bisa mereka kerjakan, bisa dijalankan oleh hakim-hakim Timor-Lorosa'e. Berkas-berkas Unit Kejahatan Berat tentang terdakwa-terdakwa Timor Lorosa'e harus diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diteruskan ke Pengadilan Distrik Dili (yang perlu diperkuat dan diberi dukungan, seperti halnya seluruh sistem peradilan Timor Lorosa'e).

Unit Kejahatan Berat harus diperpanjang satu tahun lagi, untuk melanjutkan tugas (a). Meskipun mereka tidak akan bisa mengeluarkan dakwaan internasional jika tidak ada pengadilan untuk mengadilinya, persoalan yang sama akan muncul jika Panel Khusus diperpanjang, karena tumpukan kasus dan kenyataan bahwa panel ini tidak akan diperpanjang tanpa batas waktu, karena diperlukan waktu

bertahun-tahun agar semua yang telah disusun dakwaannya bisa diajukan ke pengadilan. Berkas kasus yang bertambah, dan pernyataan pers mengenai orang-orang yang harus didakwa, bisa membantu memberikan momentum dan bukti bagi pembentukan dan pengadilan dalam mahkaman pengadilan pidana internasional.

Tugas (c), dimaksudkan maupun tidak, adalah kebohongan kejam yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggap keadilan sebagai senjata *realpolitik*, bukannya sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada melestarikan kebohongan ini.

Terimakasih banyak untuk perhatian Anda, dan kami berharap Anda berhasil dalam menyusun Misi PBB lanjutan yang menyeimbangkan kebutuhan rakyat dan pemerintah Timor-Lorosa'e dengan kebutuhan Perseorikatan Bangsa-Bangsa. Setelah 23 tahun ketidakberdayaan PBB dalam mengakhiri pendudukan ilegal Indonesia, yang disusul dengan lima tahun kegiatan yang intens, PBB punya kewajiban untuk menuntaskan apa yang telah dimulainya.

Rakyat Timor Lorosa'e terus bersabar, tetapi kami tidak bisa melupakan. ❖

Refleksi Invasi Indonesia, 7 Desember 1975

7 Desember 2003, Aliansi Nasional Timor Lorosa'e untuk Pengadilan Internasional dan *Rede Feto* menyerukan kepada masyarakat Timor Lorosa'e untuk tidak melupakan invasi Indonesia atas Timor Lorosa'e, 28 tahun yang lalu.

Sebuah koordinasi yang baik antara Aliansi Nasional dan Rede Feto dengan membagi waktu dan kegiatan yang saling melengkapi seruan dan tuntutan mereka. Pada pagi hari, Aliansi Nasional mengadakan diskusi pengalaman masyarakat mengenai invasi militer pada 7 Desember 1975. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi kerja Aliansi Nasional.

Dalam pernyataannya yang berjudul "Kita Tidak Boleh Melupakan Hari Invasi, 7 Desember 1975", Aliansi Nasional mengajukan tuntutannya, antara lain didirikannya pengadilan internasional, memperkuat tekanan internasional terhadap Indonesia untuk bekerja sama dengan Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus UNMISET, melanjutkan dukungan keuangan internasional terhadap pembangunan Timor Lorosa'e, dukungan internasional terhadap hak asasi manusia masyarakat Aceh dan Papua Barat, serta menuntut pengertian para pemimpin Timor Lorosa'e atas tuntutan keadilan para korban.

Sementara itu, siang harinya *Rede Feto* mengorganisir pawai keliling dengan membawa isu Anti Kekerasan Rumah Tangga, Penghormatan terhadap Hak Anak dan Perempuan. Sayangnya, tak banyak orang yang menyadari bahwa 7 Desember 2003, 28 tahun yang lalu adalah hari dimulainya rangkaian kejahatan yang sistematis oleh Pemerintah Indonesia.



Domingos Siqueira Gusmão berbagi kenangan mengenai pendudukan Indonesia dengan generasi muda.

Siapa di La'ó Hamutuk?

Staf La'ó Hamutuk: Cassia Bechara, Simon Foster, Tomas (Ató) Freitas, Selma Hayati, Mericio (Akara) Juvinal, Yasinta Lujina, Inês Martins, Charles Scheiner, João Sarmiento, Jesuina (Delly) Soares Cabral

Penerjemah: Xylia Ingham, Nino Sari, Pamela Sexton, Kylie

Dewan Penasehat: Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno "Cailoro" Rodrigues, Pamela Sexton, Aderito de Jesus Soares

Editorial: Keadilan setelah Berakhirnya Misi UNMISSET

Pada Bulan Januari, sebuah Misi Penilaian Teknis dari Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York mengunjungi Timor Lorosa'e untuk mengevaluasi apakah keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosa'e harus dilanjutkan setelah UNMISSET menyelesaikan misinya pada Bulan Mei mendatang. Aliansi Nasional Timor Lorosa'e untuk Pengadilan Internasional, dimana La'o Hamutuk termasuk di dalamnya, menyampaikan pernyataan berikut kepada Misi Penilaian Teknis.

Aliansi Nasional Timor Lorosa'e untuk Pengadilan Internasional menghargai perhatian yang berlanjut dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mendukung perdamaian, keamanan, stabilitas, dan administrasi pemerintahan di Timor Lorosa'e. Tetapi, kami kecewa dengan dukungan yang sejauh ini diberikan setengah hati untuk keadilan. Kami mengajukan beberapa usul untuk keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa setelah berakhirnya UNMISSET yang bisa membantu mengakhiri kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap rakyat kami dan kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi antara tahun 1975 dan 1999.

Kami adalah koalisi dari organisasi-organisasi yang mewakili organisasi non-pemerintah lokal dan internasional, gereja, mahasiswa, dan korban-korban kejahatan-kejahatan tersebut. Meskipun kami telah dikecewakan oleh perhatian yang kurang hangat pada isu keadilan yang diperlihatkan oleh Pemerintah Timor Lorosa'e pada bulan-bulan terakhir ini, kami berbagi pandangan mereka bahwa pertanggungjawaban utama terletak pada masyarakat internasional. Timor Lorosa'e adalah negara yang baru, kecil, dan miskin dengan sistem peradilan yang masih lemah. Tidak masuk akal dan tidak realistis untuk mengharapkan pemerintah kami secara sendirian bisa mewujudkan keadilan.

Tetapi keadilan harus diwujudkan, dengan menuntut pertanggungjawaban para dalang dan komandan dari para pelaku yang melakukan kekejaman-kekejaman terhadap rakyat kami selama invasi dan pendudukan selama 24 tahun secara brutal oleh rejim Soeharto terhadap negeri kami. Invasi ini dinyatakan tidak sah menurut hukum oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan banyak dari kejahatan yang terjadi termasuk dalam yurisdiksi universal, melanggar Statuta Roma dan Regulasi UNTAET 2000/15. Kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan terhadap seluruh dunia (dan setelah Mei 1999 secara langsung melanggar suatu kesepakatan yang telah ditandatangani Indonesia dengan Sekretaris Jenderal PBB), dan seluruh masyarakat internasional berbagi pertanggungjawaban untuk melihat bahwa mereka yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan dibawa ke pengadilan demi keadilan.

Pada Bulan Januari 2000, ketika Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Lorosa'e merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal PBB agar "*Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mendirikan suatu pengadilan hak asasi manusia internasional ... untuk menerima keluhan dan mengadili serta menghukum orang-orang yang*

didakwa ... pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional pokok yang terjadi di Timor Lorosa'e sejak Januari 1999 tanpa memandang kewarganegaraan orang per-orang atau keberadaan orang-orang tersebut ketika pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan."

Sayangnya, bahkan sejak saat itu, masyarakat internasional telah menyimpang jauh dari keadilan. Diperlukan lebih dari setengah dari masa UNTAET sebelum Unit Kejahatan Berat mulai berfungsi secara efektif, dan sampai hari ini 76% dari orang-orang yang telah didakwa, termasuk semua orang Indonesia, diberikan perlindungan

(Lanjutan ke halaman 14)

Apakah La'o Hamutuk itu?

La'o Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor Lorosa'e yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor Lorosa'e yang efektif. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf *La'o Hamutuk* baik itu staf Timor Lorosa'e maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji. Terakhir, *La'o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, La'o Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor Lorosa'e serta masyarakat internasional.